



LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN RANCANGAN ARSITEKTUR SPBE RB TEMATIK PENGENTASAN KEMISKINAN PEMERINTAH PROVINSI NTB

Kendali Dokumen:

Nama Penulis	Versi	Tanggal	Tanda Tangan
MARIA ULFA DEWI			
DIDIK SETIAWAN		Juli 2023	
RIDHO MAULANA			
AGUNG BUDI KUSUMA			
RIZKY YANUARICA SYAHARRA		4 Juli 2023	

Riwayat Dokumen

Riwayat Revisi

Nomor Revisi	Tanggal Revisi	Kesimpulan perubahan	Penulis

Referensi Dokumen

Nama Dokumen	Versi	Penulis

Daftar Distribusi

Nama	Jabatan	Perusahaan	Keterangan

DAFTAR ISI

Riwayat Revisi	2
Referensi Dokumen	2
Daftar Distribusi	2
1. Ringkasan Eksekutif	4
2. Pendahuluan	4
2.1. Latar Belakang	4
2.2. Visi dan Misi Instansi	4
2.3. Tujuan dan Sasaran Instansi	5
3. Arsitektur SPBE As-Is	7
4. Arsitektur SPBE To-Be	13
5. Peta Rencana SPBE	19
6. Penutup	22

1. Ringkasan Eksekutif

Dalam menghadapi kondisi global saat ini, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola pemerintahan bukan lagi menjadi suatu pilihan, namun telah menjadi suatu keharusan. Tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi pendukung dalam kegiatan pemerintahan, baik dalam kegiatan administrasi pemerintahan maupun pelayanan publik yang diharapkan mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi layanan pemerintah. Selaras dengan apa yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik, SPBE ini ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Namun, ketika menilik kondisi dibawah yang ada saat ini, khususnya dalam hal ini yang adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan bertemu dengan suatu realitas bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat masih belum berjalan. Banyak kondisi-kondisi dimana sistem informasi, pengolahan data dan pelayanan publik masih menggunakan metode lama/manual. Tentu hal ini sangat berpengaruh terhadap kerentanan keamanan data itu sendiri, banyak data yang hilang, corrupt atau bahkan terkena virus. Pun dalam hal pelayanan publik, akan banyak membuang waktu, tenaga, dan biaya. Dalam hal penerapan SPBE di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih mengalami sejumlah kendala seperti adanya aplikasi-aplikasi SPBE yang belum ditingkatkan menuju integrasi, minimnya kapasitas pusat data, dokumen arsitektur SPBE dan kebijakan internal belum terkoordinasi yang seharusnya menjadi concern pemerintah daerah untuk kedepannya.

2. Pendahuluan

2.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, Kepala Daerah diamanatkan menetapkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah paling lambat tahun 2023. Maksud dan tujuan disusunnya Arsitektur SPBE adalah memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan operasional layanan pemerintahan yang terpadu secara nasional serta mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi. SPBE ini akan digunakan selaras dengan arahan Presiden terkait dengan Reformasi Birokrasi Tematik pada 4 klaster prioritas yang mana salah satunya yaitu pengentasan kemiskinan.

2.2. Visi dan Misi Instansi

1. Visi

Visi Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 – 2025 yang tertuang dalam RPJPD adalah: TERWUJUDNYA MASYARAKAT NUSA TENGGARA BARAT YANG BERIMAN, MAJU DAN SEJAHTERA. Visi Pembangunan tersebut mengarah pada pencapaian tujuan nasional, yaitu “masyarakat adil dan makmur” seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan tujuan otonomi daerah, yaitu “terwujudnya kesejahteraan masyarakat”. Sementara itu, visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran Tahap ke - 4 dari RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025, diarahkan pada pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan

keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Berpedoman pada Visi dan arahan RPJPD Provinsi NTB tahun 2005 - 2025 tahap ke - 4, serta Visi Pembangunan Nasional Tahun 2020 - 2024, maka Visi pembangunan yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Provinsi NTB Tahun 2019 - 2023 adalah "Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang". Dalam visi tersebut terdapat kata kunci "NTB GEMILANG" yang bermakna:

1. Suatu kondisi masyarakat NTB yang siap dan tanggap menghadapi berbagai bencana yang didukung oleh kelembagaan dan infrastruktur yang memadai.
2. Suatu kondisi masyarakat NTB yang mampu memenuhi hak-hak dasarnya di bidang sosial, budaya dan ekonomi, yang dipenuhi dari hasil kreativitas dan inovasi SDM masyarakat NTB melalui pengelolaan SDA yang berkelanjutan.
3. Suatu kondisi masyarakat NTB yang aman, damai dan harmonis, yang didukung oleh Pemerintahan yang profesional melayani, bebas dari KKN, transparan dan akuntabel, bersendikan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan universal dalam mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang baldatun toyyibatun warobbun ghofur.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi untuk membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang, ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019 - 2023 sebagai berikut:

1. NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur, serta konektivitas antar wilayah.
2. NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi.
3. NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah.
4. NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.
5. NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian/agribisnis, pariwisata dan industrialisasi.
6. NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berakhlak dan penegakan hukum yang berkeadilan.

2.3. Tujuan dan Sasaran Instansi

Tujuan pembangunan NTB Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

1. Terwujudnya ketangguhan menghadapi resiko bencana.
2. Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk pengembangan sektor unggulan.
3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel.
4. Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing.
5. Terwujudnya pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing.
6. Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan.
7. Terwujudnya pertumbuhan pertanian/agribisnis dan investasi yang berkualitas.
8. Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan.
9. Terwujudnya perindustrian yang unggul.
10. Terwujudnya kehidupan masyarakat NTB yang madani (Bahagia).

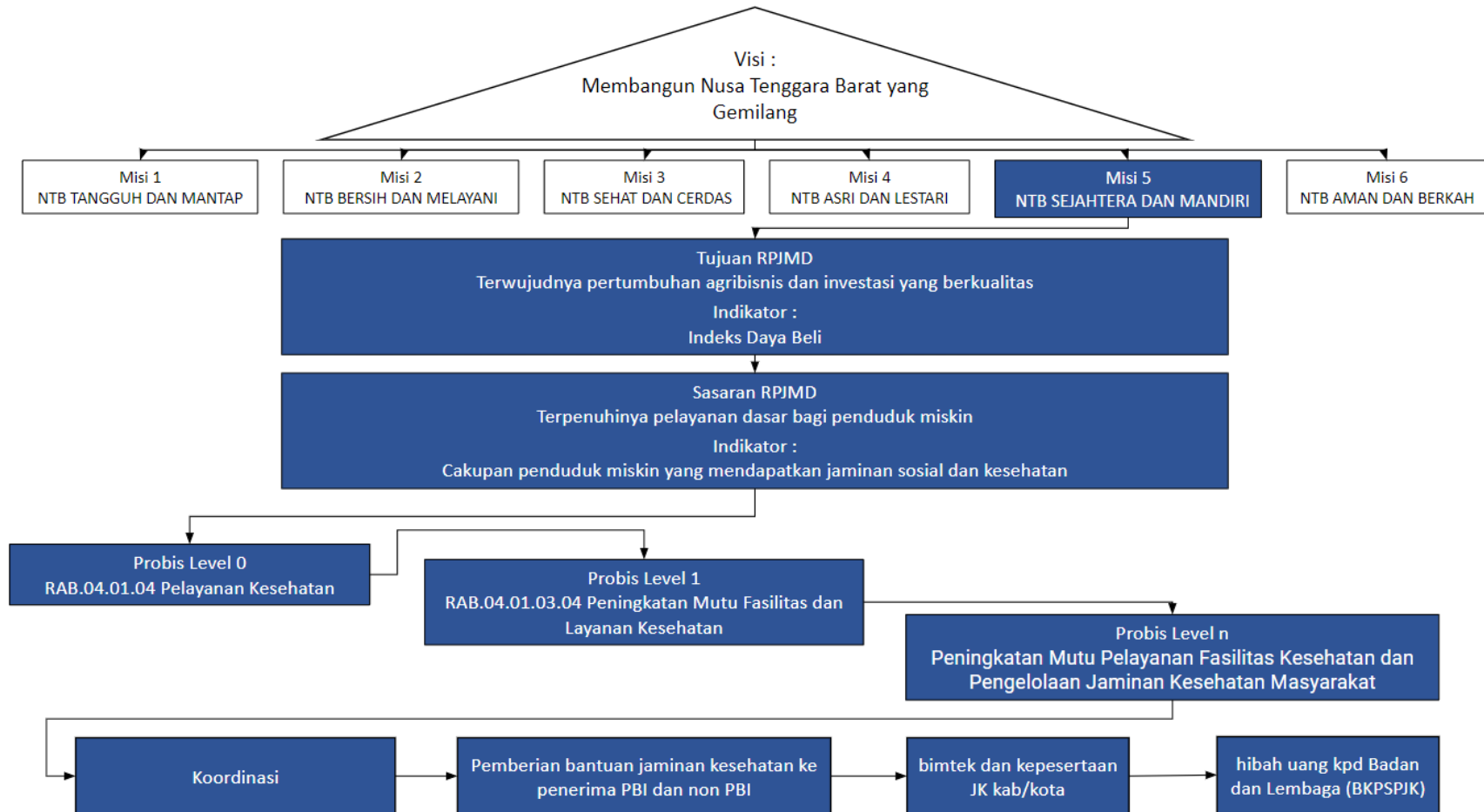
Berdasarkan tujuan pembangunan, maka sasaran pembangunan NTB Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kapasitas dalam Penanggulangan Bencana.
2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah.
3. Meningkatkan Konektivitas Antar Wilayah.
4. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah.
5. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
6. Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Meningkatkan Profesionalisme ASN.
8. Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat.
9. Meningkatkan Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat.
10. Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Layanan Pendidikan.
11. Meningkatkan Kualitas, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.

12. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan.
13. Meningkatnya Investasi (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha).
14. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian dalam Arti Luas.
15. Meningkatnya Jaminan Kesehatan dan Sosial bagi Penduduk Miskin .
16. Meningkatnya Ketahanan dan Keragaman Konsumsi Pangan.
17. Terpenuhinya Pelayanan Dasar bagi Penduduk Miskin.
18. Terjaganya Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok.
19. Meningkatnya Kemampuan Masyarakat Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup.
20. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata.
21. Meningkatnya Daya Saing Industri.
22. Menurunnya Pengangguran Terbuka.
23. Meningkatnya Nilai Sosial Budaya dan Toleransi Masyarakat.
24. Meningkatnya Kualitas dan Penegakan Produk Hukum Daerah.
25. Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat.
26. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3. Arsitektur SPBE As-Is

Melalui penerapan domain layanan SPBE dalam melakukan identifikasi layanan pemerintah, maka dapat mempercepat terwujudnya agenda pembangunan untuk melakukan transformasi pelayanan publik menuju layanan digital pemerintah terintegrasi.



3.1. Domain Arsitektur Proses Bisnis

Pada domain arsitektur proses bisnis dilakukan klasifikasi jenis tugas dan fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara serta Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara. Domain proses bisnis disusun dengan cara menjabarkan tugas dan fungsi pemerintahan dari fungsi-fungsi kementerian berdasarkan standar penamaan urusan pemerintahan.

Dengan adanya klasifikasi berupa pengelompokan tugas dan fungsi pemerintahan dari setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, maka dapat menggambarkan potensi kolaborasi antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah serta pengintegrasian secara terpadu di setiap elemen pemerintahan dalam melakukan tugas dan fungsi yang diemban. Klasifikasi proses bisnis, dilakukan secara umum dan tidak terikat dengan organisasi yang ada, maka diharapkan dapat mengakomodasi setiap fungsi organisasi yang ada pada setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pemerintahan dari instansi pemerintah, dengan tidak membedakan organisasi yang mengemban urusan pemerintahan tertentu.

Tabel domain/metadata/referensi arsitektur SPBE As-Is

ID	Nama Bisnis/Urusan (Daftarkan semua proses bisnis/urusan pemerintahan yang diselenggarakan hingga proses bisnis level-n)	Uraian Bisnis/Urusan (Merupakan deskripsi dari urusan pemerintahan yang diselenggarakan)	Sasaran Strategis (Isikan sasaran strategis eselon 1 yang terkait dengan proses bisnis dimaksud)	Indikator Kinerja Utama (IKU) -- (Tuliskan indikator yang menjadi ukuran keberhasilan dari sasaran strategis yang bersesuaian)	Nilai IKU Target (Nilai IKU yang ditargetkan)	Nilai IKU Terealisasi (Nilai realisasi IKU yang dicapai)	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
NTB-DAB.04.01.09	Pelayanan Kesehatan	Proses bisnis ini terkait Pelayanan Kesehatan di lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat	Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan	100%	100%	Dinas Kesehatan	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.01 KESEHATAN	RAB.04.01.09 PELAYANAN KESEHATAN		Pemprov NTB
NTB-DAB.04.01.09.01	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan dan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Proses bisnis ini terkait dengan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan dan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat di lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat	Meningkatnya peserta JKN yang dapat mengakses pelayanan kesehatan	Persentase peserta JKN dapat mengakses pelayanan kesehatan	100%	100%	Bidang Pelayanan Kesehatan	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.01 KESEHATAN	RAB.04.01.09 PELAYANAN KESEHATAN	RAB.04.01.09.01 PENINGKATAN MUTU FASILITAS DAN LAYANAN KESEHATAN	Pemprov NTB

3.2. Domain Arsitektur Layanan SPBE

Dalam domain arsitektur layanan SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional, selanjutnya diklasifikasikan substansi layanan SPBE ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur layanan SPBE yang berupa 4 (empat) tingkat, yaitu:

- Domain layanan, yang mengelompokkan layanan pemerintahan ke dalam domain layanan pemerintahan sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- Area layanan, yang menjelaskan area layanan pemerintah sesuai dengan target layanan, dikelompokkan ke dalam area layanan sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- Kategori layanan, yang menjelaskan layanan pemerintah yang merupakan layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga);
- Sub kategori layanan, yang menjelaskan lebih rinci dari kategori layanan sebagai tingkat 4 (keempat). Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional

Tabel domain/metadata/referensi arsitektur SPBE As-Is

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	→ Kementerian/Lemb aga Terkait (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	Potensi Manfaat
NTB-DAL.01. 25.02	Pelayanan Kesehatan	Memberikan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Di Nusa Tenggara Barat	Membantu Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat di Nusa Tenggara Barat	Dinas Kesehatan	Kementerian Kesehatan; Rumah Sakit; Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)	RAB.04.01 KESEHATAN	Masyarakat Umum; Fasilitas Layanan Kesehatan Primer	Non Elektronik	Mempermudah Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat
NTB-DAL.01. 25.02.01	Layanan untuk Meningkatkan Mutu Fasilitas Kesehatan dan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Memberikan layanan untuk peningkatan mutu fasilitas kesehatan dan pengelolaan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat di lingkup Nusa Tenggara Barat	Membantu meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan cakupan layanan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat	Bidang Pelayanan Kesehatan	Kementerian Kesehatan; Rumah Sakit; Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)	RAB.04.01 KESEHATAN	Masyarakat Umum; Fasilitas Layanan Kesehatan Primer	Non Elektronik	Membantu memudahkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas

(Link Tabel : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ncXmCd6X7Y8ECYnwCxY-6Wbq_VDTXvcu/edit#gid=1533478961)

3.3. Domain Arsitektur Data dan Informasi

Domain arsitektur data dan informasi disusun berdasarkan kebutuhan data yang digunakan pada proses bisnis dan layanan di pemerintahan yang sudah diklasifikasikan dalam referensi arsitektur data dan informasi. Domain arsitektur data dan informasi digunakan untuk mengetahui data apa saja yang digunakan dalam proses bisnis, ataupun layanan SPBE yang sifatnya berdiri sendiri, serta dengan prinsip yang sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Satu Data Indonesia. Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain. Kerangka kerja dari arsitektur data dan informasi terdiri atas referensi arsitektur data dan informasi serta domain arsitektur data dan informasi.

Tabel domain/metadata/referensi arsitektur SPBE As-Is

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	← Penghasil Data/Produsen Data	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)	Informasi yang Terkait (Input)
NTB-DAD.04 .01.04.01	Data Jaminan Kesehatan Penduduk	Data tentang kepesertaan jaminan kesehatan yang terdiri dari PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan Non PBI.	Pengambilan keputusan, perumusan kebijakan terkait jaminan kesehatan	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Kesehatan	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Data peserta jaminan kesehatan di Nusa Tenggara Barat, yang meliputi : 1. Penerima Bantuan Iuran (PBI) : PBI APBN dan PBI APBD 2. Non PBI : Penerima Pekerja Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/Mandiri, Bukan Pekerja (BP)

(Link Tabel : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a2qdbFVBvh5_UyqOGqMQLJsOnFvPLGcC/edit#gid=330922425)

3.4. Domain Arsitektur Aplikasi SPBE

Dalam domain arsitektur aplikasi SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional, selanjutnya diklasifikasikan substansi aplikasi SPBE ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur aplikasi SPBE berupa 4 (empat) tingkat, yaitu:

- Domain aplikasi, yang mengelompokkan aplikasi pemerintah ke dalam 2 (dua) domain aplikasi pemerintah, sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- Area aplikasi, yang menjelaskan area aplikasi pemerintah sesuai dengan target layanan, sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- Kategori aplikasi, yang menjelaskan aplikasi pemerintah sesuai dengan target layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga);
- Sub kategori aplikasi, yang menjelaskan lebih rinci dari kategori aplikasi sebagai tingkat 4 (keempat). Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional.

Tabel domain/metadata/referensi arsitektur SPBE As-Is

ID	Nama Aplikasi (Tuliskan nama aplikasi secara lengkap beserta akronimnya)	Uraian Aplikasi (Uraikan definisi dari aplikasi)	Fungsi Aplikasi (Penjabaran fungsi-fungsi utama dalam aplikasi)	→ Layanan (Dependency)
NTB-DAA.04.01.04.01	Satu Data Kesehatan NTB	Sistem informasi yang menampilkan data kesehatan di Nusa Tenggara Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Data Posyandu - Data Gizi - Data Kesehatan Keluarga (Kesga) - Data Penyakit Menular - Data Penyakit Tidak Menular - Data Imunisasi - Data Kesehatan Lingkungan - Data SDMD dan Farmasi - Data Pelayanan Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Kesehatan Keluarga - Layanan Gizi Masyarakat dan Promosi Kesehatan - Layanan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga - Penyediaan Fasilitas dan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi - Layanan untuk Meningkatkan Mutu Fasilitas Kesehatan dan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat - Layanan untuk Sumber Daya Manusia Kesehatan - Layanan Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan - Layanan Surveilans, Imunisasi dan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana serta bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) - Layanan Kesehatan Penyakit Menular, Zoonosis dan Penyakit Tidak Menular - Layanan ketatausahaan, keuangan, aset, perencanaan dan penganggaran serta evaluasi dan pelaporan
	Aplikasi Satu Data Kesehatan (ASDK)	Sistem informasi yang menampilkan data kesehatan di Nusa Tenggara Barat yang terhubung dengan berbagai aplikasi lain di Kementerian Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Data Posyandu - Data Gizi - Data Kesehatan Keluarga (Kesga) - Data Penyakit Menular - Data Penyakit Tidak Menular - Data Imunisasi - Data Kesehatan Lingkungan - Data SDMD dan Farmasi - Data Pelayanan Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Kesehatan Keluarga - Layanan Gizi Masyarakat dan Promosi Kesehatan - Layanan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga - Penyediaan Fasilitas dan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi - Layanan untuk Meningkatkan Mutu Fasilitas Kesehatan dan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat - Layanan untuk Sumber Daya Manusia Kesehatan - Layanan Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan - Layanan Surveilans, Imunisasi dan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana serta bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) - Layanan Kesehatan Penyakit Menular, Zoonosis dan Penyakit Tidak Menular - Layanan ketatausahaan, keuangan, aset, perencanaan dan penganggaran serta evaluasi dan pelaporan

(Link Tabel : <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nXaOD9dW2xgnOm37KTT6C5RJe09rh0oc/edit#gid=1551863883>)

3.5. Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE

Dalam domain arsitektur infrastruktur SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional, selanjutnya substansi infrastruktur SPBE diklasifikasikan ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur infrastruktur SPBE berupa 3 (tiga) tingkat, yaitu:

- a. Domain infrastruktur, yang mengelompokkan infrastruktur ke dalam domain infrastruktur sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- b. Area infrastruktur, yang menjelaskan area infrastruktur sesuai dengan domain infrastruktur dalam mendukung pengelolaan aplikasi serta data dan informasi, dikelompokkan ke dalam area infrastruktur sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- c. Kategori infrastruktur, yang menjelaskan lebih rinci dari area infrastruktur, sebagai tingkat 3 (ketiga), yang menjadi struktur di tingkat nasional.

Domain pada arsitektur infrastruktur SPBE belum ada.

NIHIL

3.6. Domain Arsitektur Keamanan SPBE

Domain arsitektur keamanan SPBE bertujuan untuk mendeskripsikan pengendalian dan pengintegrasian keamanan data dan informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE yang terpadu dalam SPBE nasional dan menjadi acuan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat dilakukan pengendalian melalui identifikasi program keamanan, pertimbangan kelayakan keamanan serta regulasi keamanan yang komprehensif.

Keamanan mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (non-repudiation) sumber daya terkait data dan informasi, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE. Penjaminan kerahasiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya. Penjaminan keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi. Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan. Penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi. Penjaminan kenirsangkalan dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital. Penerapan keamanan harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan. Kerangka kerja arsitektur keamanan SPBE terdiri atas referensi arsitektur keamanan SPBE dan domain keamanan SPBE

Domain pada arsitektur keamanan SPBE belum ada.

NIHIL

4. Arsitektur SPBE To-Be

Arsitektur SPBE adalah pengubah sekaligus jembatan: pengubah strategi dan jembatan menuju pemanfaatan teknologi. Intinya adalah Strategi keselarasan Bisnis-Teknologi. Diharapkan IPPD dapat merencanakan visi jangka menengah 3-5 tahun sebagai strategi pembangunan dan pengembangan sesuai dengan urusan dan fungsi pemerintahan yang ditugaskan. Dalam Arsitektur SPBE To-Be ini memperlihatkan adanya sebuah penyederhanaan proses bisnis, penyederhanaan alur kerja yang rumit dan pengintegrasian aplikasi-aplikasi yang masih terpisah-pisah. Arsitektur SPBE To-Be ini menggambarkan sebuah perencanaan kedepannya disertai dengan domain-domain mulai dari proses bisnis, layanan, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur dan aplikasi yang baru (to-be).

4.1. Domain Arsitektur Proses Bisnis

Pada domain arsitektur proses bisnis dilakukan klasifikasi jenis tugas dan fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara serta Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara. Domain proses bisnis disusun dengan cara menjabarkan tugas dan fungsi pemerintahan dari fungsi-fungsi kementerian berdasarkan standar penamaan urusan pemerintahan.

Dengan adanya klasifikasi berupa pengelompokan tugas dan fungsi pemerintahan dari setiap Instansi pusat dan Pemerintah Daerah, maka dapat menggambarkan potensi kolaborasi antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah serta pengintegrasian secara terpadu di setiap elemen pemerintahan dalam melakukan tugas dan fungsi yang diemban. Klasifikasi proses bisnis, dilakukan secara umum dan tidak terikat dengan organisasi yang ada, maka diharapkan dapat mengakomodasi setiap fungsi organisasi yang ada pada setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pemerintahan dari instansi pemerintah, dengan tidak membedakan organisasi yang mengemban urusan pemerintahan tertentu.

[Tabel domain/metadata/referensi arsitektur SPBE To-Be]

ID	Nama Bisnis/Urusan (Daftarkan semua proses bisnis/urusan pemerintah an yang diselenggarakan hingga proses bisnis level-n)	Uraian Bisnis/Urusan (Merupakan deskripsi dari urusan pemerintahan yang diselenggarakan)	Sasaran Strategis (Isikan sasaran strategis eselon 1 yang terkait dengan proses bisnis dimaksud)	Indikator Kinerja Utama (IKU) -- (Tuliskan indikator yang menjadi ukuran keberhasilan dari sasaran strategis yang bersesuaian)	Nilai IKU Target (Nilai IKU yang ditargetkan)	Nilai IKU Terealisasi (Nilai realisasi IKU yang dicapai)	→ Unit Kerja (Dependency)	→ RAB Level 1 Nasional (Dependency)	→ RAB Level 2 (Dependency)	→ RAB Level 3 (Dependency)	→ RAB Level 4 (Dependency)	→ Instansi (Dependency)
NTB-DA B.04.01.09	Pelayanan Kesehatan	Proses bisnis ini terkait Pelayanan Kesehatan di lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat	Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan	100%	100%	Dinas Kesehatan	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.01 KESEHATAN	RAB.04.01.09 PELAYANAN KESEHATAN		Pemprov NTB
NTB-DA B.04.01.09.01	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan dan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Proses bisnis ini terkait dengan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan dan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat di lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat	Meningkatnya peserta JKN yang dapat mengakses pelayanan kesehatan	Persentase peserta JKN dapat mengakses pelayanan kesehatan	100%	100%	Bidang Pelayanan Kesehatan	RAB.04 PERLINDUNGAN SOSIAL DAN KESEHATAN	RAB.04.01 KESEHATAN	RAB.04.01.09 PELAYANAN KESEHATAN	RAB.04.01.09.01 PENINGKATAN MUTU FASILITAS DAN LAYANAN KESEHATAN	Pemprov NTB

4.2. Domain Arsitektur Layanan SPBE

Pada domain arsitektur layanan to be, upaya perbaikan "Layanan untuk Meningkatkan Mutu Fasilitas Kesehatan dan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, yang semula menggunakan data manual diarahkan ke elektronik dengan cara mengintegrasikan aplikasi yang digunakan oleh kabupaten/kota, provinsi dan juga kementerian, sehingga data yang didapatkan lebih akurat.

Tabel domain/metadata/referensi arsitektur SPBE To-Be

ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Unit Pelaksana → Unit Kerja (Dependency)	→ Kementerian/Lembaga Terkait (Dependency)	Urusan Pemerintahan → RAB Level 2	→ Target Layanan (Dependency)	Metode Layanan	Potensi Manfaat
	Pelayanan Kesehatan	Memberikan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Di Nusa Tenggara Barat	Membantu Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat di Nusa Tenggara Barat	Dinas Kesehatan	Kementerian Kesehatan; Rumah Sakit; Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), Dinas Sosial, DPMPD DUKCAPIL, BAPPEDA	RAB.04.01 KESEHATAN	Masyarakat Umum; Fasilitas Layanan Kesehatan Primer	Elektronik	Mempermudah Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat
NTB-DAL.01.25.02.01	Layanan untuk Meningkatkan Mutu Fasilitas Kesehatan dan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Memberikan layanan untuk peningkatan mutu fasilitas kesehatan dan pengelolaan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat di lingkup Nusa Tenggara Barat melalui integrasi layanan secara elektronik dengan pemerintah kabupaten/kota	Membantu meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan cakupan layanan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat	Bidang Pelayanan Kesehatan	Kementerian Kesehatan; Rumah Sakit; Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), Dinas Sosial, DPMPD DUKCAPIL, BAPPEDA	RAB.04.01 KESEHATAN		Elektronik	- Membantu memudahkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas - Kecepatan, efisiensi dan akurasi data

(Link Tabel : <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L1fwms0BaBuNeVhREGbiYeZkcsrqUMo/edit#gid=1533478961>)

4.3. Domain Arsitektur Data dan Informasi

Domain arsitektur data dan informasi disusun berdasarkan kebutuhan data yang digunakan pada proses bisnis dan layanan di pemerintahan yang sudah diklasifikasikan dalam referensi arsitektur data dan informasi. Domain arsitektur data dan informasi digunakan untuk mengetahui data apa saja yang digunakan dalam proses bisnis, ataupun layanan SPBE yang sifatnya berdiri sendiri, serta dengan prinsip yang sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Satu Data Indonesia. Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain. Kerangka kerja dari arsitektur data dan informasi terdiri atas referensi arsitektur data dan informasi serta domain arsitektur data dan informasi.

Tabel domain/metadata/referensi arsitektur SPBE To-Be

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	← Penghasil Data/Produsen Data	→ Penanggung Jawab Data/ Wali Data (Dependency)	Informasi yang Terkait (Input)
NTB-DAD.04 .01.04.01	Data Jaminan Kesehatan Penduduk	Data tentang kepesertaan jaminan kesehatan yang terdiri dari PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan Non PBI.	Pengambilan keputusan, perumusan kebijakan terkait jaminan kesehatan	Terbuka	Data Statistik	Tahunan	Dinas Kesehatan	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Data peserta jaminan kesehatan di Nusa Tenggara Barat, yang meliputi : 1. Penerima Bantuan Iuran (PBI) : PBI APBN dan PBI APBD 2. Non PBI : Penerima Pekerja Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/Mandiri, Bukan Pekerja (BP)

(Link Tabel : <https://docs.google.com/spreadsheets/d/19NLv909UJBDZ95tJnHkzEEQUG6clnDKd/edit#gid=330922425>)

4.4. Domain Arsitektur Aplikasi SPBE

Pada domain arsitektur aplikasi to be, upaya perbaikan pada aplikasi "Satu Data Kesehatan NTB" dilakukan integrasi antar aplikasi yang digunakan oleh kabupaten/kota, provinsi (Satu Data Kesehatan NTB) dan juga kementerian (Aplikasi Satu Data Kesehatan (ASDK)) sehingga ada otomatisasi antar aplikasi.

Tabel domain/metadata/referensi arsitektur SPBE To-Be

ID	Nama Aplikasi (Tuliskan nama aplikasi secara lengkap beserta akronimnya)	Uraian Aplikasi (Uraikan definisi dari aplikasi)	Fungsi Aplikasi (Penjabaran fungsi-fungsi utama dalam aplikasi)	→ Layanan (Dependency)
NTB-DAA.04.01.04.01	Satu Data Kesehatan NTB	Sistem informasi yang menampilkan data kesehatan di Nusa Tenggara Barat yang terintegrasi dengan Kementerian Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Data Posyandu - Data Gizi - Data Kesehatan Keluarga (Kesga) - Data Penyakit Menular - Data Penyakit Tidak Menular - Data Imunisasi - Data Kesehatan Lingkungan - Data SDMK dan Farmasi - Data Pelayanan Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Kesehatan Keluarga - Layanan Gizi Masyarakat dan Promosi Kesehatan - Layanan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga - Penyediaan Fasilitas dan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi - Layanan untuk Meningkatkan Mutu Fasilitas Kesehatan dan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat - Layanan untuk Sumber Daya Manusia Kesehatan - Layanan Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan - Layanan Surveilans, Imunisasi dan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana serta bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) - Layanan Kesehatan Penyakit Menular, Zoonosis dan Penyakit Tidak Menular - Layanan ketatausahaan, keuangan, aset, perencanaan dan penganggaran serta evaluasi dan pelaporan

ID	Nama Aplikasi (Tuliskan nama aplikasi secara lengkap beserta akronimnya)	Uraian Aplikasi (Uraikan definisi dari aplikasi)	Fungsi Aplikasi (Penjabaran fungsi-fungsi utama dalam aplikasi)	→ Layanan (Dependency)
	Aplikasi Satu Data Kesehatan (ASDK)	Sistem informasi yang menampilkan data kesehatan di Nusa Tenggara Barat yang terhubung dengan berbagai aplikasi lain di Kementerian Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Data Posyandu - Data Gizi - Data Kesehatan Keluarga (Kesga) - Data Penyakit Menular - Data Penyakit Tidak Menular - Data Imunisasi - Data Kesehatan Lingkungan - Data SDMK dan Farmasi - Data Pelayanan Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Kesehatan Keluarga - Layanan Gizi Masyarakat dan Promosi Kesehatan - Layanan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga - Penyediaan Fasilitas dan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi - Layanan untuk Meningkatkan Mutu Fasilitas Kesehatan dan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat - Layanan untuk Sumber Daya Manusia Kesehatan - Layanan Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan - Layanan Surveilans, Imunisasi dan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana serta bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) - Layanan Kesehatan Penyakit Menular, Zoonosis dan Penyakit Tidak Menular - Layanan ketatausahaan, keuangan, aset, perencanaan dan penganggaran serta evaluasi dan pelaporan

(Link Tabel : <https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UKKZrFMvo9qPoQq1JNYjdXs9LZeCK9IU/edit#gid=1551863883>)

4.5. Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE

NIHIL

4.6. Domain Arsitektur Keamanan SPBE

NIHIL

5. Peta Rencana SPBE

5.1. Gap Analysis

Tabel Gap Analysis

Kondisi Saat ini	Kondisi Target	Analisis Gap	Rencana Tindakan	Inisiatif Strategis
silo aplikasi di provinsi dan kementerian dalam merangkum data-data kesehatan termasuk data jaminan kesehatan masyarakat	seluruh aplikasi terintegrasi / otomasi antar aplikasi	data dan aplikasi belum terintegrasi secara otomatis	pengintegrasian aplikasi data terkait jaminan kesehatan masyarakat	Layanan Data Jaminan Kesehatan Terintegrasi
proses penginputan data yang berulang karena menggunakan banyak aplikasi yang ada di daerah	menggunakan satu aplikasi pada pemerintah daerah yaitu satu data kesehatan NTB	penginputan data pada aplikasi yang berulang oleh kab/kota	menggunakan satu aplikasi pada pemerintah daerah yaitu satu data kesehatan NTB	
masih ada masyarakat miskin yang belum tercover jaminan kesehatan	seluruh masyarakat miskin di provinsi NTB sudah tercover jaminan kesehatan	terdapat masyarakat miskin yang belum terdata pada Data Jaminan Kesehatan	Verifikasi dan Validasi Data dengan Instansi terkait	

5.2. Matriks Peta Rencana SPBE

Tabel Peta Rencana SPBE

No	Project/Activities				UIC	Baseline	Target		
						2022	2023	2024	
SASARAN PROGRAM KEGIATAN STRATEGIS: Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin									
Indikator	Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan jaminan sosial dan kesehatan						100	100	
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: (Layanan Data Jaminan Kesehatan Terintegrasi)									
1 Tata Kelola									
	A	Penyusunan Kebijakan				BIRO HUKUM SETDA, BIRO PEMERINTAHAN DAN OTDA SETDA, DINKES	(Baseline)	(Target)	(Target)
		-	Penyusunan Kebijakan penggunaan satu aplikasi yaitu Satu Data Kesehatan NTB untuk daerah Prov NTB					1 SK Gub	
		-	Pelaksanaan Kerjasama penggunaan aplikasi Satu Data Kesehatan NTB dengan Kabupaten/Kota					10 PKS	
		-	Sosialisasi Kebijakan penggunaan aplikasi Satu Data Kesehatan NTB untuk daerah Prov NTB						10 kab/kota
2 Manajemen									
	A	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat				DINKES	(Baseline)	(Target)	(Target)
		-	Kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah provinsi						10 kegiatan
	B	Manajemen Risiko SPBE				DINKES		100%	
		-	Penyusunan Manajemen Resiko					100%	
		-	Penguatan Komite Manajemen Risiko					100%	
		-	Penguatan Unit Kepatuhan Risiko					100%	
		-	Penilaian Resiko					100%	

		- Penanganan Resiko SPBE			100%	
		- Pemantauan dan Reviu Penerapan Manajemen Risiko			100%	
		- Membangun Budaya Sadar Risiko			100%	
	C	Manajemen Keamanan informasi			100%	
		- Penyiapan Pedoman Pelaksanaan Manajemen Keamanan Informasi			100%	
		- Identifikasi isu internal dan eksternal keamanan informasi			100%	
		- Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut Perbaikan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi			100%	
3 Layanan						
	A	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		(Baseline)	(Target)	(Target)
		- Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan				10 kegiatan
		- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah				100%
		- Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				100%
4 Aplikasi						
	A	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINKES, DINSOS, DPMPD DUKCAPIL, KEMENTERIAN TERKAIT, BPJS	(Baseline)	(Target)	(Target)
		- Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				100%
	B	Pengintegrasian Aplikasi				100%
		- Integrasi proses bisnis				100%
		- Integrasi data				100%
		- Integrasi aplikasi				100%

5 Infrastruktur						
	A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
		-	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah dan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		(Baseline)	(Target)
		-	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%
		-	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%
6 Keamanan						
	A	Penyelenggaraan Keamanan Informasi				
		-	Edukasi Kesadaran Keamanan		(Baseline)	(Target)
		-	Penilaian Kerentanan Keamanan			1
		-	Penerapan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan			1
		-	Penanganan Insiden Keamanan			1
		-	Monitoring, Evaluasi dan Tindak Lanjut Perbaikan			1
7 Audit TIK						
	A	Penyelenggaraan Audit Internal TIK				
		-	Penyiapan pedoman pelaksanaan audit internal TIK		(Baseline)	(Target)
		-	Pemanfaatan Tools Audit TIK			1
		-	Pelaksanaan Audit Aplikasi			1
		-	Pelaksanaan Audit Infrastruktur			1
		-	Pelaksanaan Audit Keamanan Informasi			1

Upaya pengintegrasian data jaminan kesehatan untuk memperoleh data yang akurat perlu dilakukan agar bantuan jaminan kesehatan kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin dan rentan miskin (penerima PBI) akan tepat sasaran, yang diharapkan dapat menunjang penurunan angka kemiskinan di NTB sekaligus meningkatkan cakupan peserta jaminan kesehatan di NTB (penerima PBI dan non - PBI).

Pengintegrasian tahap awal dilakukan antara aplikasi "Satu Data Kesehatan NTB" milik dinas kesehatan Provinsi NTB dengan "Aplikasi Satu Data Kesehatan (ASDK)" Kementerian Kesehatan, yang terintegrasi juga dengan aplikasi DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) Kementerian Sosial, aplikasi "Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)" DPMPD Dukcapil dan BPJS. Target pada tahun 2025 adalah migrasi data dari "Satu Data Kesehatan NTB" ke NTB SATU DATA .

6. Penutup

Dengan adanya Arsitektur SPBE ini diharapkan memberikan kemudahan terhadap Dinas Kesehatan dalam mengelola dan melakukan pendataan pada peserta jaminan kesehatan di Nusa Tenggara Barat. Dan dengan adanya sistem informasi, lebih mudah dalam mengelola data Penerima Bantuan Iuran (PBI) yaitu PBI APBN dan PBI APBD; dan Non PBI yaitu Penerima Pekerja Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/Mandiri, Bukan Pekerja (BP).

SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.